KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA GUA BATU CERMIN, DESA BATU CERMIN, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR

Nada April
Program Studi D4 Destinasi Pariwisata, Fakultas Interdisiplin
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Email: nadaapril27@gmail.com

Linda Susilowati
Program Studi D4 Destinasi Pariwisata, Fakultas Interdisiplin
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Abstract

Indonesia has been establishing tourism as the leading industry sector because it's 22,4% growth in 2019. The establishment of the tourism sector as the leading industry sector must be supported by good development and management. To achieve development goals, local communities must involve in the tourism sector. This research is conducted to find out the involvement of Batu Cermin Village's community on developing and managing tourist destinations. The data collection techniques used in this study are interviews and observations. From this research found that the participation of local communities in Batu Cermin Village can be categorized into five types of participation: idea contribution, work participation, expertise participation, material participation, and fund contribution. Participation of local communities in Batu Cemin is important because the accurate information is only owned by local people, besides that community trust is needed for the successful implementation of policies. There is also some supporting factor and obstacle of community involvement in Batu Cerim. The supporting factor is managerial of the which been moved to Village-Owned Enterprise (BUMDes). The obstacles to the involvement of the local community in Batu Cermin Village are the lack of knowledge about tourism issues, lack of the awareness of destination ownership, and lack of ability to see the economic opportunities.

Keywords: Community Involvement, Development of Tourist Destinations, Batu Cermin Village

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau. Berdasarkan ulasan Aqhsa yang diambil dari laman goodnewsfromindonesia.id, Pulau-pulau di Indonesia menyimpan banyak kekayaan ekosistem bawah laut. Selain ekosistem bawah laut, hutan tropis di Indonesia juga menyimpan berbagai macam jenis flora dan fauna endemik yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Dilansir dari nationalgeographic.grid.id, keindahan alam Indonesia membuat Indonesia mendapatkan banyak penghargaan, antara lain sebagai *World's Best Island* pada tahun 2018 yang diberikan oleh organisasi *Travel and Leisure*, *Best Diving Area* yang diberikan oleh *Marine Diving Fair* pada tahun 2018, dan *Best Destination to Witness Hammerheads* oleh *Resort and Travel Fair* pada tahun 2018.

Banyaknya penghargaan yang diperoleh, membuat pariwisata Indonesia mengalami pertumbuhan dan mendorong pertumbuhan sektor lainnya. Data dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang diambil dari laman kemenparekraf.go.id menunjukan, pertumbuhan pariwisata di Indonesia mencapai 22,4% per tahun dan menjadi top 20 di dunia tahun 2019. Pada tahun 2017, pariwisata Indonesia berada di ranking 42 atau naik 8 poin dari yang sebelumnya berada di ranking 50. Hal inilah yang membuat pemerintah Indonesia menetapkan sektor pariwisata sebagai *leading sector industry* untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Pariwisata didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah (Undang-Undang No.10 tahun 2009). Menurut Pitana dan Gayantri (2009, dalam Hermawan, 2016) pariwisata mencakup tiga elemen utama, yaitu elemen dinamik, elemen statis, dan elemen konsekuensial. Elemen dinamik adalah elemen yang bergerak, wisatawan bergerak menuju ke suatu destinasi wisata. Elemen statis adalah elemen yang tetap, wisatawan akan mencari tempat untuk singgah atau tinggal secara sementara. Elemen konsekuensial adalah konsekuensi akibat dari elemen dinamik dan elemen statis yang terpenuhi, yang akan memberi dampak pada ekonomi, sosial budaya dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan khususnya pada masyarakat lokal.

Murphy (1998) mengatakan, masyarakat lokal merupakan unsur penggerak utama dalam kegiatan pariwisata. Hal tersebut karena sumber daya dan keunikan masyarakat lokal baik berupa fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) adalah daya tarik utama dari suatu obyek wisata yang menjadi bagian dari sistem ekologi. Ardika (2005) menjelaskan bahwa pola kehidupan tradisional

masyarakat merupakan hal penting yang harus disiapkan agar masyarakat lokal dapat berinteraksi secara spontan dengan wisatawan dalam memberikan pengertian dan pengetahuan tentang lingkungan dan kebudayaan setempat. Dengan adanya interaksi spontan antara masyarakat dan wisatawan diharapkan dapat memberi rasa bangga pada masyarakat lokal terhadap kebudayaannya.

Pemberdayaan masyarakat lokal merupakan salah satu prinsip dasar kepariwisataan di mana masyarakat memiliki hak dalam proses pembangunan pariwisata dan berkewajiban menjaga daya Tarik wisata, serta membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan kelestarian lingkungan (Undang–Undang No.10 tahun 2009). Tampubolon (1977, dalam Purnamasari, 2011) menjelaskan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dan memiliki fungsi dalam perencanaan. Pertama, berpartisipasi dalam memberikan dukungan. Kedua, berpartisipasi dalam hal kebijaksanaan. Ketiga, berpartisipasi sebagai pengawas dalam perencanaan obyek wisata. Menurut Kharisma (2014), partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu prasyarat penerapan konsep *good governance* (tata pemerintahan yang baik). Paradigma *goverment* telah bergeser menjadi *governance*. *Governance* dirancang untuk mengarah kepada *good governance*, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Dari tiga prinsip tersebut, partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting.

Konsep dalam pariwisata di mana melibatkan masyarakat merupakan tujuan utama dari pengembangan disebut sebagai, *Community Based Tourism* atau komunitas berbasis masyarakat. Menurut Ardika (2005), komunitas berbasis masyarakat merupakan dasar dari pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menegaskan bahwa masyarakat lokal bukan merupakan bagian dari obyek wisata akan tetapi sebagai penentu pengembangan obyek wisata itu sendiri. Menurut Ziku (2015), destinasi wisata di Indonesia banyak menggunakan konsep pariwisata berbasis masyarakat sebagai prinsip dasar pengembangan berkelanjutan. Prinsip komunitas berbasis masyarakat digunakan karena memberikan keuntungan kepada masyarakat lokal sebagai fokus pengembangan.

Terdapat banyak destinasi di Indonesia yang menggunakan prinsip komunitas berbasis masyarakat, salah satunya adalah daerah Manggarai Barat. Manggarai Barat adalah Kabupaten yang terletak di Pulau Flores tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Manggarai Barat memiliki banyak obyek wisata, seperti Pulau Komodo, *Pink Beach*, Wae Rebo, dan Gua Batu Cermin. Staf dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat menjelaskan bahwa, Gua Batu Cermin adalah gua terowongan yang berada di bukit batu yang memiliki luas kurang lebih 19 hektar dengan tinggi 75 meter. Lebih lanjut staf tersebut menjelaskan, gua tersebut dinamai Gua Batu Cermin karena sinar matahari masuk ke gua melalui dinding-dinding gua dan memantulkan cahaya ke

dinding batu sehingga merefleksikan cahaya kecil ke areal lain seperti halnya cermin.

Gua Batu Cermin banyak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara karena akses jalan menuju gua yang mudah dan bagus selain jalan yang mudah dan bagus, jarak menuju gua batu cermin juga terbilang dekat karena hanya bekisar kurang lebih 15 menit dari Bandara Internasional Komodo. Selain jalan yang mudah dan bagus, sejarah masa lalu gua ini yang sebelumnya berada di dasar laut juga menjadi daya tarik. Berdasarkan Data Statistik Wisata Terpadu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Gua Batu Cermin pertama kali ditemukan oleh missionaris sekaligus arkeolog asal Belanda yang bernama Theodore Verhoven pada tahun 1951. Pada sejumlah bagian dalam gua menempel fosil terumbu karang dan biota laut yang sudah membantu salah satunya fosil penyu dan sekaligus menjadi salah satu bukti jika Gua Batu Cermin ini pernah berada di dasar laut pada masa lalu.

Sejak tahun 2014 Gua Batu Cermin mengalami peningkatan pengunjung tiap tahunnya. Data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, mencatat bahwa pada tahun 2014 jumlah wisatawan mencapai 55.476 orang dan mengalami peningkatan menjadi 163.054 orang ditahun 2018. Secara garis besar peningkatan pengunjung berdampak dalam bentuk pengembangan pariwisata. Dampak dari bentuk pengembangan tersebut bisa dilihat dari fisik dan non fisik. Dampak fisik seperti berdirinya beberapa bangunan yang digunakan untuk penginapan, usaha *souvenir* dan rumah makan. Sedangkan dampak non fisik dari bentuk pengembangan destinasi wisata tersebut adalah sosial dan budaya.

Perkembangan sektor pariwisata di Gua Batu Cermin tentu menjadi peluang bagi masyarakat. Meskipun hal tersebut merupakan peluang yang baik, hal tersebut juga dapat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dan pemerintah desa Batu Cermin dalam mengembangkan area pariwisata, karena harus melibatkan masyarakat di setiap kebijakan-kebijakan dan program-program yang akan dibuat. Menurut Alam (2008), melibatkan masyarakat menjadi tantangan, karena ketika ingin melibatkan masyarakat artinya berusaha memberi nilai baru kepada masyarakat yang sudah memiliki nilai. Seperti contoh, pemerintah desa berusaha melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi atau terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan suatu destinasi wisata dengan memberi pemahaman konsep baru tentang kepariwisataan kepada masyarakat yang tidak mengetahui konsep itu sebelumnya, jadi akan sulit membuat masyarakat paham tentang konsep kepariwisataan. Contoh lain adalah sosial budaya, tantangannya adalah bisa memberi dampak positif dan negatif.

Meskipun menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, keterlibatan masyarakat tetap penting karena merupakan indikator keberhasilan suatu pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. Menurut Fadil (2013), manfaat keterlibatan antara lain, yaitu; Adanya keleluasaan bagi masyarakat untuk mengembangkan dan mengelola suatu destinasi wisata secara mandiri, menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk membangun diri serta bisa melihat peluang usaha bisnis, dan terciptanya masyarakat yang kritis dan tanggap terhadap rintangan apapun. Oleh karena itu, menurut peneliti penting untuk memetakan keterlibatan masyarakat Desa Batu Cermin terhadap pengembangan dan pengelolaan destinasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif. Bogdan dan Tailor (2002, dalam Subandi, 2011) mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif-deskriptif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau tindakan kebijakan. Penelitian kualitatif-deskriptif digunakan karena peneliti menginginkan data yang menghasilkan informasi berkualitas, seperti informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan atau berhubungan. Data yang berkualitas tadi akan dideskripsikan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Desa Batu Cermin terhadap pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata gua, juga sebagai pedoman atau panduan untuk pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam membuat kebijakan-kebijakan dan program-program yang harus melibatkan masyrakat Desa Batu Cermin.

Data diambil pada bulan Januari sampai Maret 2020 dari dua lokasi yang berbeda di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain; di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan di destinasi wisata Gua Batu Cermin, Desa Batu Cermin. Teknik mengumpulkan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan observasi atau pengamatan. Menurut Basuki (2006), wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Sedangkan observasi atau pengamatan merupakan proses mengamati peristiwa, pose, dan kejadian disertai daftar yang perlu diobservasi.

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti karena ingin mengetahui secara rinci dan jelas, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata gua. Peneliti memiliki beberapa pertanyaan yang telah disusun dan akan mengadakan wawancara atas dasar pertanyaan tersebut dan melakukan wawancara pada sebelas responden dari kalangan yang berbeda. Sebelas responden tersebut terdiri dari Kepala bidang

Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Kepala Desa Batu Cermin, Ranger atau pemandu wisata gua, pemilik usaha rumah makan, pemilik usaha *souvenir*, masyarakat lokal yang bekerja sebagai petani, dan wisatawan domestik atau wisatawan dalam negeri. Wisatawan yang dipilih memiliki fungsi sebagai validator terhadap data yang diberikan masyarakat lokal kepada peneliti. Ketika responden merespon pertanyaan yang diajukan, maka peneliti akan mencatat hasil respon tersebut.

Observasi atau pengamatan dilakukan peneliti pada dua lokasi yang berbeda, di Dinas Priwisata dan Kebudayaan dan di Destinasi Wisata Gua Batu Cermin. Observasi yang dilakukan antara lain mengamati BUMDes setempat, data kenaikan pengunjung sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, dan monitoring yang dilakukan dinas pariwisata dan kebudayaan terhadap cara BUMDes Batu Cermin mengelola destinasi wisata Gua Batu Cermin yaitu dengan menempatkan satu petugas lapangan dari dinas yang bertugas sebagai penarik retribusi daerah sekaligus memantau lokasi wisata tersebut.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Desa Batu Cermin

Desa Batu Cermin terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas 2.947,50 km2 dengan luas daratan 2974,5km2, berbatasan dengan Laut Flores di sebelah Utara, Laut Sawu di sebelah Selatan, Kabupaten Manggarai di sebelah Timur, dan berbatasan dengan Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah Barat. Jumlah penduduk mencapai 4.943 jiwa dan mata pencaharian penduduk mayoritas sebagai petani.

Desa batu cermin berada di wilayah dataran rendah dan memiliki destinasi wisata unggulan, yaitu Gua Batu Cermin. Gua Batu Cermin memiliki panjang mencapai 200 meter dan memiliki banyak lorong yang dipenuhi stalagtit dan stalagmit. Keunikan dari Gua Batu Cermin adalah terdapat fosil terumbu karang dan biota laut seperti penyu yang sudah membatu dan menempel di dinding gua. Selain keunikannya, aksesibilitas menuju Gua Batu Cermin cukup mudah karena hanya berjarak kurang lebih 15 menit dari Bandara Internasional Komodo.

Latar Belakang Pengelolaan Destinasi Wisata Gua Batu Cermin

Destinasi wisata Gua Batu Cermin terletak di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akses atau jalan menuju destinasi ini hanya berjarak kurang lebih 15 menit dari Bandara

Internasional Komodo.Kondisi sarana dan prasarana infrastruktur yang ada di destinasi wisata Gua Batu Cermin belum memadai, dilihat dari banyaknya sampah yang ada. Berbeda dengan infrastruktur, aksesibilitas menuju destinasi Gua Batu Cermin sudah bagus yang bisa dilihat dari kondisi jalan aspal yang bagus. Masalah lain yang muncul adalah kurangnya pasokan air bersih, karena hal itu perlu dilakukan pengembangan.

Pada awal pengembangannya, Gua Batu Cermin dikelola langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tetapi menurut Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai Barat, pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah desa dengan maksud dan tujuan agar pengembangan dan pengelolaan lebih tertata rapi. Hasilnya dibuatlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes Batu Cermin ini merupakan salah satu hasil dari keterlibatan masyarakat desa Batu Cermin. Kepala Desa Batu Cermin mengusulkan untuk membuat BUMDes Batu Cermin, bertujuan agar masyarakat ikut terlibat dalam proses pengembangan dan pengelolaan wisata Gua Batu Cermin secara mandiri.

Keterlibatan Masyarakat di Destinasi Wisata Gua Batu Cermin

Sebelum dibentuknya BUMDes di Desa Batu Cermin pengelolaan ditangani langsung oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, sehingga orang yang bekerja di destinasi wisata Gua Batu Cermin banyak yang bukan berasal dari masyarakat Desa Batu Cermin dan secara tidak langsung menunjukan keterlibatan masyarakat Desa Batu Cermin masih sangat minim. Setelah dibentuknya BUMDes, menjadi peluang bagi masyarakat Batu Cermin untuk lebih terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata Gua Batu Cermin. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang dibuat oleh pelaksana operasional BUMDes, yang menyebutkan bahwa semua pekerja wajib berasal dari masyarakat lokal Batu Cermin.

Kepala Desa juga menuturkan bahwa keterlibatan masyarakat Desa Batu Cermin berkisar hanya sampai 5% dari total populasi, di mana masih banyak masyarakat desa yang belum terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Gua Batu Cermin. Kisaran angka tersebut merupakan perkiraan Kepala Desa Batu Cermin yang melihat dari jumlah pekerja dan pemilik usaha. Pekerjaan yang disediakan oleh BUMDes untuk masyarakat Desa Batu Cermin salah satunya adalah ranger atau pemandu wisata gua. Jumlah pemandu wisata gua di Gua Batu Cermin pada tahun 2019 mencapai 17 orang, yang mana ke-17 orang tersebuat adalah masyarakat lokal Desa Batu Cermin. Selain pemandu wisata gua, membuka usaha kuliner dan *souvenir* merupakan cara masyarakat lokal Desa Batu

Cermin untuk terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Gua Batu Cermin.

Pemilik kios *souvenir* terlibat dalam memberikan ide atau usulan kepada BUMDes sebagai pengelola, untuk tidak membangun terlalu banyak amenitas karena banyaknya pembangunan amenitas bisa berdampak hilangnya nuansa alam. Pemandu wisata gua terlibat dalam memberikan ide atau usulan kepada BUMDes Batu Cermin untuk memperbanyak kelas bahasa selain bahasa Inggris, seperti dibuka kelas bahasa Mandarin atau kelas bahasa Jepang dan pemandu wisata Gua Batu Cermin juga terlibat dalam membersihkan kawasan sekitar Gua Batu Cermin. Ide atau usulan dari pemandu wisata gua tersebut untuk memperbanyak kelas bahasa karena pemandu wisata gua kesulitan menjelaskan Gua Batu Cermin kepada wisatawan mancanegara yang berasal dari China atau Jepang yang bahasa Inggris bukan merupakan bahasa utama. Pelaku usaha kuliner atau rumah makan juga mengusulkan, untuk mengadakan kursus kelas memasak atau tata boga. Ide atau usulan untuk mengadakan kursus kelas memasak atau tata boga karena menurut pelaku usaha kuliner, memasak bukan hanya tentang rasa melainkan juga tentang cara mengkomunikasikan masakan dan cara menyajikan masakan tersebut sehingga terlihat menarik

Sedangkan usulan atau saran dari masyarakal lokal yang tidak bekerja sebagai pemandu wisata gua ataupun tidak memiliki usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan yakni petani, mengusulkan Ide atau usulan untuk membuat kebijakan berupa aturan mendirikan rumah makan harus memiliki makanan khas Manggarai di sekitar kawasan destinasi wisata Gua Batu Cermin.

Desa Batu Cermin memberi masukan kepada BUMDes Batu Cermin sebagai pengembang dan pengelola tersebut menginginkan BUMDes Batu Cermin sebagai pengembang dan pengelola untuk membuat kebijakan, yang mana kebijakan tersebut berupa aturan bagi pemilik rumah makan yang ada disekitar kawasan destinasi wisata Gua Batu Cermin untuk membeli hasil tani mereka. Hal ini dibenarkan peneliti melihat dari pengamatan yang dilakukan peneliti di destinasi wisata Gua Batu Cermin banyaknya rumah makan yang berasal dari luar seperti, rumah makan padan, coto makassar, dan masakan jawa.

Menurut petani ide atau usulan tersebut dapat memberikan keterlibatan mereka dalam kepariwisataan. Tetapi, ide atau usulan ini tidak pernah diberikan kepada BUMDes karena mereka tidak tahu di mana harus menyampaikan ide atau usulan tersebut. Sebenarnya BUMDes Batu Cermin sebagai pengembang dan pengelola sudah menyediakan wadah bagi masyarakat lokal Batu Cermin untuk menyampaikan ide, usulan, saran maupun aspirasi di kantor BUMDes Batu Cermin. Selain menyediakan tempat atau wadah untuk aspirasi masyarakat lokal

Desa Batu Cermin, BUMDes Batu Cermin juga terlibat sebagai pengembang dan pengelola, sedangkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat sebagai pengawas. BUMDes Batu Cermin mempekerjakan orang untuk menjaga usaha *souvenir* milik BUMDes Batu Cermin yang berasal dari luar masyarakat Desa Batu Cermin.

Menurut Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan Kabupaten Manggarai Barat terdapat tiga hal yang menghambat keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan dan mengelola destinasi tersebut, yaitu; Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kepariwisataan, kurangnya kemampuan melihat peluang ekonomi yang membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan, dan kurangnnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan destinasi wisata Gua Batu Cermin. Kurangnya pemahaman masyarakat lokal Batu Cermin tentang kepariwisataan bisa dilihat dari masyarakat lokal Batu Cermin yang pasif terhadap pariwisata, yang mana masyarakat lokal Batu Cermin harus diarahkan untuk terlibat. Kurangnya kemampuan masyarakat lokal Batu Cermin melihat peluang ekonomi bisa dilihat dari tingkat kreatifitas mereka, menurut peneliti peluang usaha sangat banyak seperti *souvenir*, kuliner atau rumah makan, dan penginapan. Sedangkan kurangnya kesadaran masyarakat lokal Batu Cermin akan kepemilikan destinasi wisata Gua Batu Cermin bisa dilihat dari orientasi yang salah, karena hanya memiliki anggapan Gua Batu Cermin sebagai tempat untuk menghasilkan uang.

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Destinasi

Pitana (2002), menyatakan bahwa partisipasi tidak hanya merupakan kontribusi tenaga, waktu, dan materi lokal secara cuma-cuma untuk mendukung berbagai kebijakan-kebijakan dan program-program pengembangan dan pengelolaan melainkan sebagai suatu keterlibatan secara aktif dalam setiap proses. Peran aktif yang dimaksud adalah mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan penikmat hasilnya.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan destinasi wisata Gua Batu Cermin dengan merujuk pada teori yang digunakan oleh Sastropoetro (1986). Menurut Sastropoetro (1986). bentuk partisipasi masyarakat dikategorikan menjdi 5 jenis partispasi, yaitu: 1. Partisipasi Pikiran atau *Pychological Participation*, 2. Partisipasi Tenaga atau *Physical Participation*, 3. Partisipasi Keahlian atau *Participation with Skill*, 4. Partisipasi Barang atau *Material Participation*, dan 5. Partisipasi Uang atau *Money Participation*.

Berikut contoh partisipasi masyarakat tersebut; Partisipasi Pikiran yang ditunjukan dengan adanya ide atau usulan dari masyarakat yang diberikan kepada BUMDes sebagai pengembang dan pengelola dalam rangka memperbaiki agar kedepannya lebih baik lagi. Contohnya adalah dengan memberikan ide atau usulan dari pemilik kios *souvenir*, *Ranger* atau pemandu wisata gua, pelaku usaha kuliner atau rumah makan, dan petani. Partisipasi Tenaga yang ditunjukan dengan adanya masyarakat yang berpartisipasi dengan memberikan tenaga untuk pengembangan dan pengelolaan destinasi. Contohnya adalah dengan adanya kegiatan membersihkan kawasan destinasi wisata Gua Batu Cermin yang hanya dilakukan oleh pemandu wisata gua. Partisipasi Keahlian yang ditunjukan dengan adanya masyarakat yang memberi keterampilan atau kemampuan yang dimiliki mereka, dengan menampilkan Tarian Caci. Partisipasi Barang yang ditunjukan dengan adanya masyarakat desa Batu Cermin yang menyumbangkan swadaya dalam pembangunan fisik. Seperti menyumbangkan kayu pembuatan palang pintu di gerbang utama masuk destinasi wisata Gua Batu Cermin. Partisipasi Uang yang ditunjukan dengan adanya masyarakat menyumbangkan sejumlah uang sebagai bentuk partisipasi tetapi masyarakat lokal desa Batu Cermin tidak terlibat.

Bentuk partisipasi-partisipasi masyarakat tersebut merupakan hasil nyata dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh BUMDes sebagai pengelola dan pengembang destinasi wisata di Gua Batu Cermin dengan peraturan mewajibkan pekerja di destinasi wisata Gua Batu Cermin harus berasal dari masyarakat lokal. Selain kebijakan berupa peraturan, BUMDes Batu Cermin harus membuat program-program yang bisa mendorong masyarakat lokal Batu Cermin untuk lebih terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan, sehingga ketika masyarakat lokal Desa Batu Cermin sudah terdorong untuk lebih terlibat, maka masyarakat dapat mengembangkan dan mengelola secara mandiri. Ketika masyarakat sudah bisa mengembangkan dan mengelola suatu destinasi secara mandiri, maka dianggap sebagai indikator penting bagi kesuksesan dari prinsip *community based tourism* atau komunitas berbasis masyarakat.

Pentingnya Keterlibatan Masyarakat di Desa Batu Cermin

Keterlibatan masyarakat di Desa Batu Cermin menjadi penting, hal ini juga sejalan dengan pendapat Conyers (1991) yang berpendapat, ada tiga alasan utama pentingnya keterlibatan masyarakat yaitu; informasi, kepercayaan, dan hak. Yang mana informasi akan digunakan sebagai alat untuk mengetahui keadaan atau kondisi desa Batu Cermin, kepercayaan yang akan membuat masyarakat desa Batu Cermin bisa lebih percaya dengan kebijakan-kebijakan dan program-program yang ada maupun yang akan dibuat oleh BUMDes selaku pengembang dan pengelola destinasi wisata Gua Batu Cermin, dan yang terakhir yaitu hak,

karena masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata di suatu destinasi.

Informasi yang didapat mengenai keadaan atau kondisi desa Batu Cermin tersebut memiliki manfaat bagi BUMDes untuk menentukan arah pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Gua Batu Cermin. BUMDes sebagai pengembang dan pengelola memiliki kuasa penuh atas pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Gua Batu Cermin, tetapi tetap harus berpatokan pada tujuan awal dibentuknya BUMDes ini. Jika BUMDes tidak melibatkan masyarakat lokal Desa Batu Cermin sebagaimana tujuan awal dibentuknya BUMDes, maka masyarakat lokal Desa Batu Cermin akan kehilangan kepercayaan kepada BUMDes sebagai pengembang dan pengelola. Selain itu, BUMDes juga akan melanggar hak masyarakat lokal Desa Batu Cermin untuk terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Gua Batu Cermin. Banyaknya aspek yang harus diperhatikan, membuat BUMDes harus diawasi dan dilakukan monitoring secara rutin agar tidak keluar dari tujuan awal. Hal ini yang membuat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat memiliki kewajiban untuk mengawasi dan melakukan monitoring kepada BUMDes.

Hal Mendorong dan Menghambat Keterlibatan Masyarakat di Desa Batu Cermin

Hal yang mendorong keterlibatan masyarakat lokal Batu Cermin adalah dengan adanya pemindahan pengelolaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat kepada BUMDes Batu Cermin. Pemindahan pengelolaan ini membuat adanya pembagian peran antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat dan BUMDes Batu Cermin, peran yang berbeda ini menghasilkan sistem pengembangan dan pengelolaan yang lebih tertata rapi dan terpadu. Peran dua pemangku kepentingan ini yaitu BUMDes Batu Cermin sebagai pengembang dan pengelola, sedangkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat sebagai pengawas. Dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara BUMDes Batu Cermin dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, maka akan memudahkan untuk membuat kebijakan-kebijakan maupun program-program yang berkaitan untuk melibatkan masyarakat lokal Desa Batu Cermin dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Gua Batu Cermin.

Kebijakan-kebijakan dan program-program dari hasil kerjasama yang baik antara BUMDes Batu Cermin dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat memberi dorongan kepada masyarakat lokal Batu Cermin untuk lebih terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Gua Batu. Kegiatan pelatihan kursus kelas bahasa Inggris dan kelas pemandu wisata gua merupakan hasil kebijakan yang baik antar dua pemangku kepentingan tersebut.

Kegiatan pelatihan tersebut dikhususkan bagi masyarakat lokal Batu Cermin, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia Desa Batu Cermin.

Selain hal yang mendorong, terdapat juga hal yang menghambat keterlibatan masyarakat lokal Desa Batu Cermin terhadapa pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Gua Batu Cermin. Ditinjau dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwiata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, terdapat tiga hal yang menghambat keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan dan mengelola destinasi tersebut, yaitu; Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kepariwisataan, kurangnya kemampuan melihat peluang ekonomi yang membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan, dan kurangnnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan destinasi wisata Gua Batu Cermin. Kurangnya pemahaman masyarakat lokal Batu Cermin tentang kepariwisataan bisa dilihat dari masyarakat lokal Batu Cermin yang pasif terhadap pariwisata, yang mana masyarakat lokal Batu Cermin harus diarahkan untuk terlibat. Kurangnya kemampuan masyarakat lokal Batu Cermin melihat peluang ekonomi bisa dilihat dari tingkat kreatifitas mereka, menurut peneliti peluang usaha sangat banyak seperti *souvenir*, kuliner atau rumah makan, dan penginapan. Sedangkan kurangnya kesadaran masyarakat lokal Batu Cermin akan kepemilikan destinasi wisata Gua Batu Cermin bisa dilihat dari orientasi yang salah, karena hanya memiliki anggapan Gua Batu Cermin sebagai tempat untuk menghasilkan uang.

Hal lain yang menghambat keterlibatan masyarakat lokal Desa Batu Cermin dilihat dari sisi pemilik usaha rumah makan, menurut pemilik usaha rumah makan tidak tersedianya kuliner khas Manggarai Barat disekitar destinasi wisata Gua Batu Cermin. Malah banyak dijumpai rumah makan padang, coto makassar, dan masakan jawa lainnya Menurut pemilik usaha *souvenir*, hal menghambat lainnya dalam melibatkan masyarakat lokal Batu Cermin adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kepariwisataan. Pemilik usaha *souvenir* tersebut, menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kepariwisataan merupakan hal yang sulit karena pola hidup agraris atau pertanian yang sudah melekat pada diri mereka. Pola hidup agraris ini membuat masyarakat tidak memiliki keberanian untuk menampilkan kemampuan yang dimiliki, padahal masyarakat lokal Batu Cermin memiliki keterampilan di bidang melukis dan memahat. Usaha *souvenir* milik BUMDes Batu Cermin di sekitar kawasan destinasi wisata Gua Batu Cermin mempekerjakan orang yang bukan berasal dari masyarakat lokal Batu Cermin, sehingga menurut peneliti bisa mengakibatkan masyarakat tidak percaya kepada BUMDes Batu Cermin sebagai pengelola. Hal lain yang paling bisa menjadi penghambat adalah orientasi keterlibatan yang salah

dari masyarakat, seperti hanya menginginkan uang dari adanya destinasi wisata Gua tersebut. Selain orientasi yang salah, beberapa masyarakat lokal desa Batu Cermin tidak terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Gua Batu Cermmin karena masyarakat lokal desa Batu Cermin kurang kreatif dan inovatif dalam berbisnis kepariwisataan.

Umumnya hal pendukung dan penghambat diatas dipengaruhi dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Menurut Cohen dan Uphoff (1977), aspek internal mencakup karakteristik individu seperti; jenis kelamin, agama, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan etnis. Sedangkan aspek eksternal. menurut Sunarti (2003) adalah pengaruh dari luar yang mempunyai kepentingan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program tersebut, seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak ketiga yakni LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Menurut Slamet (1994), aspek pendidikan penting karena komunikasi akan lebih mudah dan tanggap terhadap perubahan. Apalagi tingkat pendapatan sangat berpengaruh terhadap partisipasi karena berhubungan dengan finansial. Hal yang berpengaruh dalam mendorong dan menghambat keterlibatan masyarakat lokal Batu Cermin adalah tingkat pendidikan, dilihat dari tidak tanggapnya masyarakat lokal Batu Cermin terhadap perubahan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan keterlibatan masyarakat lokal Desa Batu Cermin terhadap pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Gua Batu Cermin di Desa Batu Cermin, dapat disimpulkan seperti pada poin-poin berikut: (1) Partisipasi masyarakat di Desa Batu Cermin dapat dikategorikan menjadi lima jenis partisipasi, yaitu; Partisipasi Pikiran terlihat dari pemilik kios *souvenir*, pelaku usaha kuliner, pemandu wisata gua, dan petani yang memberikan ide atau usulan, Partisipasi Tenaga terlihat dari adanya kegiatan untuk membersihkan sekitar kawasan destinasi wisata gua Batu Cermin oleh pemandu wisata gua, Partisipasi Keahlian yang terlihat dari beberapa masyarakat yang menampilkan tarian caci sebagai penari untuk menarik wisatawan, Partisipasi Barang terlihat dari beberapa masyarakat menyumbangkan kayu untuk membuat palang di pintu gerbang utama masuk destinasi wisata gua batu cermin, dan masyarakat Desa Batu Cermin tidak terlibat dalam partisipasi uang. (2) Pentingnya keterlibatan masyarakat desa Batu Cermin karena oleh dua alasan utama, yaitu informasi tentang keadaan desa yang akurat hanya dimiliki oleh masyarakat setempat, selain itu kepercayaan masyarakat dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah mengenai pengembangan Gua Batu Cermin. (3) Hal yang

menjadi pendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan detinasi wisata Gua Batu Cermin adalah adanya kebijakan pemindahan pengelolaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat kepada BUMDes Batu Cermin yang mengharuskan masyarakat lokal dilibatkan juga sebagai pekerja. (4) Hal yang menjadi penghambat keterlibatan masyarakat adalah kurangnya pemahaman tentang kepariwisataan, kurang kemampuan melihat peluang ekonomi, dan kurangnya kesadaran akan kepemilikan destinasi gua.

Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti kepada masyarakat lokal desa batu cermin dalam keterlibatan terhadap pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Gua Batu Cermin, seperti berikut (1) Diharapkan agar BUMDes sering mengadakan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal Desa Batu Cermin tentang kepariwisataan. (2) Diharapkan BUMDes dan pemerintah setempat dapat membuat kebijakan-kebijakan dan program-program yang dapat memberi semangat masyarakat lokal Desa Batu Cermin untuk lebih berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi Gua Batu Cermin. (3) BUMDes bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat dapat terus menjalin kerjasama yang baik dalam merangkul dan memberdayakan masyarakat setempat.

REFERENSI

Alam, A.S 2008. Tantangan dan Peluang Indonesia Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal. Goverment. Ilmu Pemerintahan. 1(1).

Ardika, I.W. 2004. Membangun Pariwisata-Budaya dan Mengendalikan Budaya Pariwisata. Bali Menuju Jagadhita: Aneka Perspektif. Denpasar: Pustaka Bali Post. 20-33

Basuki, S. 2006. Metode Penelitian. Wedatama Widya Sastra: Jakarta.

Bogdan dan Tailor. 2002, dalam Subandi 2011. Analisa Data Kualitatif. 17(33).

Cohen, J. and Uphoff, N. 1977. Rural Development Participation Concept and Measure for Project Design Implementation and Evaluation. New York: Cornell University.

Conyers, D. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar, Gajah Mada University Press: Yogyakarta.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. 2018. Statistik Wisata Terpadu. Labuan Bajo: Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

goodnewsfromindonesia.id. 2017. Pariwisata Indonesia Yang Makin Memukau. Diunduh dari https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/01/31/pariwisata-indonesia-yang-makin-memukau.

Fadil, F. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal. 2(2).

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2009. Undang-Undang Tentang Kepariwisataan. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kharisma, B. 2014. Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). Buletin Studi Ekonomi. 19(1).

Murphy, Peter. E. 1998. Toursim: A Community Aproach. London: Metheven.

nationalgeogrhapic.grid.id. 2018. Membanggakan, Inilah Prestasi Pariwisata Indonesia di Kancah Dunia. Diunduh dari https://nationalgeographic.grid.id/read/13936310/membanggakan-inilah-prestasi-pariwisata-indonesia-di-kancah-dunia?page=all, 06 2017).

Pitana dan Gayantri. 2009, dalam Hermawan, 2016. Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. Pariwisata. 3(2). 105-117

Pitana, I.G. 2002. Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah Bali dalam Pembangunan Pariwisata. Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan. Denpasar: Universitas Udayana

Sastropoetro, S. 1986. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni.

Slamet, Y. 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Sunarti. 2003. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Secara Kelompok. Jurnal Tata Loka.

Tampubolon. 1977. Dalam Purnamasari 2011, Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan. Perencanaan Wilayah dan Kota. 22(1). 49-64.

www.kemenparekraf.go.id. 2019. Siaran Pers: Pariwisata Diproyeksikan Jadi Penyumbang Devisa Terbesar Lima Tahun ke Depan. Diunduh dari https://www.kemenparekraf.go.id/post/siaran-pers-pariwisata-diproyeksikan-jadi-penyumbang-devisa-terbesar-lima-tahun-ke-depan